



# Dorong Dewan Panggil PDAM

**PONTIANAK** - Sekretaris Front Pembela Kedaulan Rakyat Kabupaten Pontianak Firmansyah memintalaporan proyek pipanisasi Rp419 juta yang terjadi di Dusun Untang Desa Pentek Kecamatan Saniang dan Sungai Pinyuh sebesar Rp1,28 miliar ke

Kejaksaan Tinggi Kalbar dapat dituntaskan. "Artinya ada penjelasan ke publik seperti apa kasus tersebut sehingga masyarakat menjadi tahu dan paham," katanya Senin malam kemarin di Pontianak.

◆ *Ke Halaman 15 kolom 5*



## Dorong Dewan Panggil PDAM

**Sambungan dari halaman 16**

Menurut dia biasanya proses penyelidikan awal menghasilkan kesimpulan sebuah kasus atau persoalan. Masyarakat Kabupaten Pontianak menunggu perjalanan dan kejelasannya seperti apa. "Kita sangat berharap ada kesungguhan. Sebab bagaimanapun ketika dilaporkan pasti ada sesuatu," ucapnya. Firmansyah juga mendukung dan mendorong langkah pemanggilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala PDAM di Mempawah. "Ini harus dikorek sebenarnya seperti apa. Jangan sampai juga kurang ada kejelasan," tutur pria yang karib disapa Bujang ini.

FPKR Kabupaten Pontianak berjanji kasus ini akan dikawal secara serius dan sungguh-sungguh. Seandainya nanti kurang ada penjelasan, kasusnya akan dikawal ke

Kejagung RI dan Komisi III DPR RI. "Bukan soal nilainya yang kami persoalkan. Akan tetapi perkembangan laporan tersebut," tuturnya.

Berita sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto mengatakan Komisi C berencana memanggil dan meminta keterangan terkait laporan proyek pipanisasi Rp419 juta di Dusun Untang Desa Pentek Kecamatan Sadaniang dan Sungai Pinyuh sebesar Rp1,28 miliar yang dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Kalbar. "Kami akan secepatnya melakukan rapat dan mendorong melakukan pemanggilan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM di Mempawah. Di satu sisi kami juga mendorong lembaga hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar melakukan penyelidikan lebih mendalam," katanya, Jumat kemarin di Pontianak.

Dia menuturkan memang

secara administrasi di 2012, BPK sudah menyatakan tidak ada temuan. Namun sifatnya hanya administrasi. Sementara proses dugaan teknis dan fisik menyelidiki lebih jauh adalah kewenangan aparat hukum. "Disini sebenarnya Kejaksaan bisa meminta audit lebih mendalam semacam audit investigasi," katanya.

Dengan kewenangan Kejaksaan meminta audit kepada BPK dan BPKP, proses penyelidikan biasanya dilanjutkan. Begitu ada kejanggalan tentu prosesnya adalah pendalaman. "Kita harus apresiasi itu," katanya.

Meski begitu, Kejaksaan sebagai lembaga aparat hukum dapat lebih luas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Kedepannya secara transparan dapat diumumkan tahapan pertahapannya. Sehingga pelapor dan pemberi informasi menerima kabar pemberitahuar. **(den)**